

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai isu yang berhubungan *governance* (khususnya CG) menjadi populer di Indonesia di penghujung abad ke-20, tepatnya menyusul krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Isu *governance* secara global kembali menguat setelah runtuhnya beberapa raksasa bisnis dunia seperti Enron dan *WorldCom* di AS, serta tragedi jatuhnya HIH dan *One-Tel* di Australia pada permulaan abad ke-21 (Lukviarman, 2016:25).

Implementasi *good corporate governance* di Indonesia masih tergolong rendah. Walaupun saat ini perusahaan berlomba-lomba untuk melaksanakan GCG, namun baru sebatas pada pemenuhan tuntutan bisnis. Pada kenyataannya sistem governansi belum dijalankan secara maksimal. Perusahaan menjalankan praktik GCG masih sebatas pada pemenuhan terhadap berbagai peraturan (Hamdani, 2016:5-6).

Berdasarkan Pasal 43 ayat 910 s.d. (4) dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01 /MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, pada Bab XI Program Pengenalan BUMN, antara lain menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan anggota direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan. Program pengenalan tersebut merupakan tanggung jawab dari

sekretaris perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan (Effendi, 2016: 41).

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar (Fahmi, 2014:62).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka apabila penerapan *good governance* atau pemerintahan yang baik dalam organisasi pemerintahan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya maka secara otomatis hal tersebut akan memudahkan pelaksanaan kegiatan disegala bidang, tak terkecuali pula hal tersebut juga akan membantu penerapan *good corporate governance* di sektor swasta (Sedarmayanti, 2012:21).

Dengan demikian agar GCG dapat tercipta maka harus ada keterlibatan dan kesungguhan dari berbagai pihak (internal maupun eksternal perusahaan). Pihak internal perusahaan secara sadar harus menerima budaya GCG yang sudah ditetapkan menjadi *best practice* oleh dunia internasional sebagai budaya positif yang harus segera dirancang dan diimplementasikan (Hery, 2016:293).

Audit internal terhadap kegiatan operasional perusahaan perlu dilakukan secara teratur, baik sebelum dirasakan adanya suatu masalah maupun sesudah terlanjur terjadi masalah. Audit secara teratur dapat mencegah terjadinya suatu masalah; manajemen akan dapat dengan segera mengetahui dan mengatasi masalah serta sebab-sebabnya sebelum masalah tersebut menjadi berkelanjutan,

atau secara tepat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, sumber-sumber penyebabnya dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengatasinya. Efektifnya peran audit internal di dalam suatu organisasi diharapkan akan meningkatkan kinerja organisasi yang bersangkutan (Hery, 2016:234-235).

Contoh kasus, saat ini kondisi tenaga auditor internal di sejumlah BUMN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta persentasenya masih sebesar 1%. Dia menyebutkan, dari 163 BUMN di negeri ini seluruhnya memiliki tenaga auditor internal. "Paling bagus auditor internal ini ada di Jasa Raharja. Sebab, 80% dari waktu kerjanya hanya untuk melakukan audit. Selain itu, proses rolling di sana (Jasa Raharja) relatif bagus," sebutnya. Selain mumpuni dalam manajemen risiko, setiap auditor internal itu harus bisa menjalankan *good corporate governance* (GCG). Terlebih, kini hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN. Tak hanya BUMN, komitmen GCG ini pun diberlakukan pada perusahaan swasta. Terutama perusahaan yang siap *go public*. Pasalnya, keberadaan tenaga auditor internal di perusahaan tersebut menjadi salah satu syarat untuk *go public*. "Ini dilakukan perusahaan grup Djarum dan Astra," tambahnya. Dikarenakan bidang kerja ini berbeda dengan akuntan publik (Ramdhani, 2016).

Menurut Soedijatno dan Teddy S (2013) dengan penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Studi Pada BUMN yang Berkantor Pusat di Bandung)*, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal pada BUMN yang berkantor pusat di Bandung sudah dilakukan dengan sangat baik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti ingin meneliti kembali apakah dengan tempat dan waktu yang berbeda, peran audit internal memiliki pengaruh yang sama seperti penelitian terdahulu terhadap penerapan *good corporate governance*. Atas dasar latar belakang diatas, maka penulis memilih judul penelitian “**PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (STUDI KASUS PADA BEBERAPA PERUSAHAAN BUMN DI KOTA BANDUNG)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Apakah terdapat pengaruh audit internal terhadap penerapan *good corporate governance* pada beberapa Perusahaan BUMN di Kota Bandung ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh audit internal terhadap penerapan *good corporate governance* pada beberapa Perusahaan BUMN di Kota Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:

1. Akademisi

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai alat bantu belajar mengajar dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai menambah wawasan dan pengetahuan agar dapat memahami mengenai pengaruh fungsi audit internal terhadap penerapan *good corporate governance* yang terjadi pada perusahaan.

2. Perusahaan

Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberi pandangan dan acuan pada perusahaan tentang pentingnya fungsi audit internal untuk melaksanakan *good corporate governance* yang baik pada perusahaan.

3. Auditor Internal

Diharapkan penelitian ini dapat membantu auditor internal agar lebih waspada dan lebih serius dalam menanggapi *good corporate governance* pada setiap perusahaan.